

BAB I

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul **“Konsistensi Indonesia Dalam Mendukung Upaya Kemerdekaan Palestina Pada Masa Pemerintahan SBY (2004-2009)”**, antara lain disebabkan oleh karena naiknya kiprah partai beratribut agama Islam dalam Pemilihan Umum tahun 2004, seperti fenomena dalam diri Partai Keadilan Sejahtera(PKS). Tingginya perolehan suara PKS dalam Pemilu 2004 menempatkannya dalam jajaran elit politik yang diperhitungkan.

Atas perubahan iklim politik di masa SBY dengan masa-masa para pendahulunya, merupakan alasan utama bagi Presiden terpilih SBY, untuk menentukan kembali arah kebijakan pemerintahannya. Salah satu fenomena yang cukup kontras terlihat pada masa tersebut antara lain, pengajuan draft “kontrak politik” kepada SBY, dengan salah satu butir pernyataan mensyaratkan kiprah pemerintah RI untuk berperan dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Menarik bila melihat tingginya antusiasme atas kabar terkini dari Palestina, yang menandakan bahwa Indonesia konsisten sebagai Negara dengan populasi masyarakat Islam terbesar di dunia.

B. Latar Belakang Masalah

Kiprah politik dunia selalu diwarnai dengan berbagai trik dan intrik antar pelakunya. Segala upaya dilakukan agar bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan, walaupun dengan jalan yang tak lazim dan seharusnya tak terjadi, yaitu perang. Salah

satu tragedi tersebut telah terjadi dikancah internasional antara Negara Palestina dan Israel yang tak berkesudahan. Atas dasar sesama Negara muslim, Indonesia khususnya pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya meningkatkan kiprah pemerintah RI untuk berperan dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Semua perbedaan politik luar negeri RI-Palestina yang dijalankan oleh tiap-tiap presiden RI memberi corak dan alur yang berbeda pula. Hingga pada masa pemerintahan SBY dimulai, berbagai tindakan konkret dan nyata mulai dilakukan sebagai upaya dukungan RI terhadap Palestina. Dari berbagai hal serta tindakan konkret dibawah ini yang akan dijabarkan, terdapat makna dari “konsistensi”¹ dalam pemerintahan SBY terhadap Palestina yaitu konsistensi antara implementasi dukungan serta konsistensi dalam berbagai tindakan-tindakan konkret yang sesuai dengan poin-poin bantuan RI kepada Palestina yang dijanjikan oleh SBY. Dibawah ini adalah berbagai konsistensi yang dilakukan SBY terhadap Palestina yang mana juga didorong oleh draft “Kontrak Politik” yang pernah dibuat antara SBY dengan PKS yang didalamnya terdapat beberapa poin yang mendesak SBY agar segera merealisasikan dukungan upaya percepatan kemerdekaan Palestina, membuka perwakilan untuk rakyat Palestina di Indonesia, serta tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut juga menjadi pondasi politik luar negeri RI dalam kepemimpinan SBY untuk merealisasikan konsistensi bantuan RI terhadap Palestina.

¹ “Makna konsistensi terurai di KBBI” dalam <http://www.attikatakbbi.com/edisicetak/content/View/254684>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2011

Semenjak awal masa pemerintahannya, pemerintah SBY segera membuktikan prioritas politik luar negerinya terhadap kemerdekaan Palestina. Segera setelah dilantik sebagai presiden, SBY segera terbang ke Mesir, guna menghadiri pemakaman mendiang mantan Presiden Palestinian Liberation Organization (PLO), pada bulan November 2004. Segera setelahnya, pada tanggal 11 November 2004, pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa segenap rakyat Indonesia turut berbelas sungkawa atas wafatnya pemimpin Palestina tersebut, disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ad Interim, Yusril Ihza Mahendra.²

Begitu pula dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina juga kembali diwujudkan dengan menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Mekkah, Arab Saudi, pada 7-8 Oktober 2005. Bersama dengan negara-negara Islam lainnya, Indonesia turut memprakarsai "*program aksi 10 tahun OKI*", yang memuat implementasi dukungan pada Palestina. Dalam kesempatan tersebut Indonesia berpartisipasi dalam *Al-Quds Fund*, yang bertujuan memelihara kelestarian masjid Al-Aqsa dari aksi-aksi vandalisme Zionis Israel. Sebagai awal dari tindakan tersebut pemerintah menghimbau kepada rakyatnya untuk menyisihkan sekurang-kurangnya 1 US\$ kepada *Al-Quds Fund*, dalam mewujudkan solidaritas Islam sedunia kepada Palestina.

Kembali menegaskan komitmennya, pada tanggal 21 April 2006, disaat menerima kunjungan Mr. Shaath sebagai Utusan Khusus Presiden Mahmoud Abbas, SBY menjanjikan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil peran aktif dalam membantu mencari solusi atas krisis keuangan yang dihadapi Palestina. Dalam pembicaraannya dengan Mahmoud Abbas via telepon, disela-sela kunjungannya ke

²www.DetikNews.com

Yordania pada tanggal 3 Mei 2006, Presiden SBY memberikan dukungannya dengan mengupayakan pengaktifan peran forum OKI untuk mendorong perana kuartet (AS, Uni Eropa, PBB, dan Rusia).

Atas perkembangan masalah yang terjadi di Yerusalem, Presiden SBY terus memberikan perhatiannya kepada kondisi terakhir masjid Al-Aqsa. Mengenai aksi penggalian Israel di sekitar kompleks Masjid, Presiden menyatakan keprihatinannya dengan menyampaikan desakannya agar tindakan tersebut segera dihentikan. Pernyataan tersebut antara lain disampaikan dalam kesempatan SBY dengan Sekretaris Jenderal OKI, Ekmeladdin Ihsanoglu, di kantor Presiden pada tanggal 12 Februari 2007.³

Dukungan Indonesia di tahun 2008, diwujudkan dalam forum *New Asia-Pacific Strategic Partnership (NAPSP)*, sebagai penindaklanjutan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* antara Indonesia-Palestina. Bersama dengan 100 Negara Asia-Afrika, Indonesia memprakarsai kerjasama pendidikan dan pelatihan bagi 10.000 tenaga Palestina.⁴ Hal tersebut merupakan bentuk praktis dan konkrit dukungan Indonesia, melalui proyek-proyek pembangunan sumber daya manusia Palestina.

Upaya Indonesia dilanjutkan dengan mendorong masuknya Palestina dalam keanggotaan Inter Parliamenter Union (IPU) atau Parlemen Se-Dunia, pada Oktober 2008.⁵ Atas keberhasilan tersebut, maka sidang parlemen Palestina akan ikut dalam sidang assembly pada bulan Oktober 2008. Hal tersebut disampaikan oleh

bid

Trias Kuncayono, *Indonesia dan Konflik Timur Tengah ; Peranan Unsur Non-Pemerintah dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif, dalam Kebijakan Indonesia dalam Konflik Palestina-Israel*, Yogyakarta -22 Februari 2006, hal 77
www.politik.infogate.com

Ketua DPR, Agung Laksono saat membuka Konferensi Internasional tentang Palestina, di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Rabu 14 Mei 2008. Lebih lanjut Agung mengungkapkan, bahwa Indonesia berkepentingan memasukkan keanggotaan Palestina di IPU, disebabkan oleh hubungan Indonesia dan Palestina telah terjalin cukup lama karena kedua bangsa memiliki kesamaan agama, yaitu karena sama-sama penduduknya mayoritas beragama Islam.

Pada akhir 2008, sehubungan dengan terjadinya agresi militer ke Gaza, Indonesia segera memberikan respon dengan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 1 US\$, guna mengurangi penderitaan penduduk sipil Palestina. Israel menggelar operasi militer secara besar-besaran yang dimulai dari tanggal 27 Desember 2008 hingga 13 Januari 2009 ke Jalur Gaza, operasi "*Cast Lead*" oleh Israel disinyalir sebagai bagian dari perangnya melawan Hamas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa operasi tersebut, merupakan praktek genosida penduduk Palestina oleh militer Israel, karena menggunakan senjata-senjata pemusnah massal, seperti penggunaan bom fosfor terhadap penduduk sipil. Eskalasi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina di Jalur Gaza disinyalir mencapai lebih dari 700 korban meninggal dan 2500 korban luka termasuk wanita dan anak-anak.

Dalam kerangka Sidang Dewan HAM ke-9 yang dilaksanakan pada 9 Januari 2009, Indonesia merespon dengan mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk aksi militer Israel ke Gaza sebagai tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan.⁶ Dalam pernyataannya di hadapan Sidang Khusus Dewan HAM, Delegasi Indonesia

Indonesia Kutuk Pelanggaran HAM Israel di Gaza,
[p://www.infomudik.antara.co.id/berita/1231507057/indonesia-kutuk-pelanggaran-ham-israel-di-gaza](http://www.infomudik.antara.co.id/berita/1231507057/indonesia-kutuk-pelanggaran-ham-israel-di-gaza),
akses pada 1 Agustus 2010

menegaskan bahwa masyarakat internasional tidak bisa lagi tinggal diam. Oleh karena itu, Delegasi Indonesia mendukung usulan agar Dewan HAM membentuk “*Rapid Response Team*” untuk memantau pelanggaran HAM di Palestina yang dilakukan oleh Israel sebagai kekuatan pendudukan, segera dihapuskannya blokade ekonomi dan dibukanya akses bagi bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh penduduk sipil.⁷

Reaksi yang muncul bukan hanya datang dari pemerintah, namun dari masyarakat Islam di Indonesia yang segera turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi menentang aksi kekejaman Zionis Israel atas Palestina. Hal tersebut dapat terlihat dari ribuan massa yang tergabung dalam forum aksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandar Lampung, serta Aceh.

Sikap Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina sudah jelas. Akan tetapi, dapat terlihat jelas bahwa pelaksanaan akan keseriusan Indonesia pada jaman Orde Baru dan sebelumnya dengan pemerintahan SBY dalam menangani konflik antara Israel dengan Palestina mengalami perbedaan. Kesadaran akan masalah kemanusiaan dan timbulnya rasa solidaritas antar sesama masyarakat muslim sedunia yang menonjol pada masa pemerintahan SBY lah yang memberikan perbedaan tersebut.

Melalui sejumlah fakta diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam perjalanan politik luar negeri antara Indonesia dengan Palestina telah terbentuk sejak dulu. Namun pada masa pemerintahan SBY, hubungan tersebut terjalin lebih erat dari

pemerintahan sebelumnya, yang mana hal ini dibuktikan lewat prioritas politik luar negeri RI terhadap Palestina serta kesadaran pribadi masyarakat Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia, untuk membantu saudara mereka yang tengah mengalami musibah di Palestina.

C. Perumusan Masalah

Dengan didasari oleh uraian mengenai latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis dapat mengemukakan dan memberikan batasan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Mengapa Indonesia pada pemerintahan SBY (2004-2009), turut berperan serta secara konsisten membantu Palestina dalam konflik dengan Israel?

D. Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *decision making*. Sebagai salah satu teori Hubungan Internasional yang dipergunakan untuk mengetahui bagaimana proses terciptanya sebuah keputusan.

Menurut *Snyder* , proses pengambilan keputusan diperoleh dari alternative urutan tindakan yang diseleksi dari sejumlah masalah terbatas, kemudian ditetapkan secara social, dari satu pokok proyek untuk melahirkan keadaan peristiwa khusus pada masa mendatang. ⁸ Inti-isi dalam *decision making* adalah bersifat pilihan tindakan. Dalam pembuatan keputusan, kita akan bertumpu pada proses pemilihan

Richard C. Snyder, *A Decision-Making Approach To The Study of Political Phenomena*, dalam *Approach To The Study Of Politics*, ed. Roland Young, Northwestern University Press, Evanston Illionis, 1958, Hal. 19

antara alternative urutan tindakan. Lingkungan memberi peningkatan pada psikologis individu, sehingga berdampak terhadap hasil keputusan.⁹

Menurut *Snyder*, individu dalam pengambilan keputusan hanya difokuskan kepada para penguasa masyarakat.¹⁰ Jika seorang presiden hendak mengambil suatu keputusan, maka orang-orang di sekitar presidenlah yang paling banyak dilibatkan, seperti wakil presiden, para menteri, atau tim penasihat presiden

Menurut *Snyder*, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tindakan para pembuat keputusan :¹¹

1. *Faktor Internal (Internal Setting)*, adalah wilayah geografis, masyarakat, lingkungan, manusia, populasi, budaya. Dipengaruhi oleh struktur sosial dan perilaku, terdiri atas : orientasi-orientasi nilai-nilai umum pokok, pola utama institusional, karakteristik utama organisasi sosial, perbedaan dan spesialisasi aturan, kelompok macam dan fungsi, proses sosial relevan melalui formasi opini, sosialisasi orang tua, dan politik.
2. *Faktor Eksternal (External Setting)*, mengacu pada berbagai kondisi dan faktor yang berada di luar batas-batas suatu negara, seperti aksi dan reaksi dari negara lain (pemerintah), masyarakat (*societies*) untuk siapa mereka bertindak, dan wilayah geografis.

Untuk lebih jelasnya, proses pengambilan keputusan akan dijelaskan melalui bagan di sebaliknya :

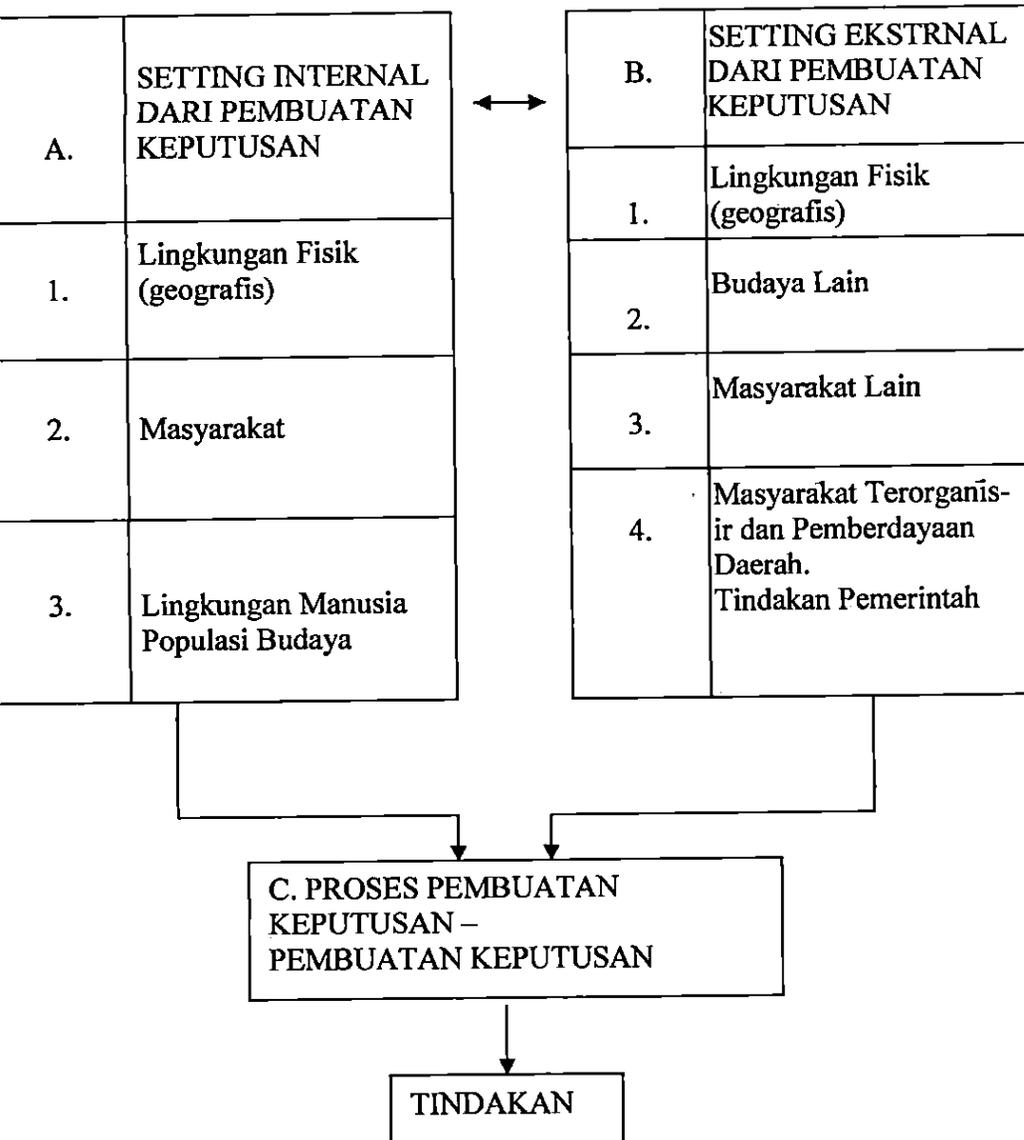
Mary Grizes Kweit dan Robert W. Kweit, *Konsep Dan Metode Analisa Politik*, Bina Aksara, Jakarta, 1966, Hal 186

bid

Richard C. Snyder, H.W. Bruck dan Burton Sapin, *Foreign Policy Decision Making as An Approach Study of International Politics*, Free Press, New York, 1962, Hal 38-43

DIAGRAM 1

Alur Pembuatan Keputusan/Kebijakan



Sumber : Richard C. Snyder, H. W. Bruck dan Burton Sapin, *Decision Making as an Approach to the Study of International Politics*, Free Press, New York. 1962 hal. 72

Dari gambar diatas, bisa dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa faktor internal dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan pola perilaku dari masyarakat.
- Sementara dalam kesejajarannya dengan faktor internal, faktor eksternal juga memiliki bagian penting sebagai bahan-bahan acuan dalam proses pengambilan keputusan.
- Dalam proses pengambilan keputusan menurut teori Snyder, pengaruh yang dimiliki oleh struktur dan pola perilaku masyarakat terhadap lingkup internal suatu negara, akan diwujudkan melalui tindakan untuk merespon kondisi diluar batas-batas teritorial yakni lingkup eksternal.

Seperti telah dijelaskan melalui paparan teori diatas, faktor internal Indonesia adalah Masyarakat Indonesia, yang 85% nya, memeluk agama Islam. Atas kesamaan hubungan sosial antara Indonesia dengan Palestina maka hal tersebut mendorong solidaritas diantara keduanya. Dukungan ini berkaitan dengan keadaan Indonesia yang merupakan negara Islam terbesar di dunia yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah yang dihadapi oleh negara Islam lain, khususnya Palestina.¹²

Merujuk kepada formasi opini dari masyarakat Islam Indonesia, yang menyalurkan aspirasinya melalui PKS sebagai contoh, yang kemudian melakukan proses tawar-menawar dengan Partai Demokrat pimpinan SBY dalam sebuah "Piagam Kerjasama". Dalam agenda regional dan internasional, dalam butir 2 pasal C, Piagam Kerjasama, secara jelas diungkapkan syarat "*dukungan upaya*

¹² Siti Mutiah Setiawati, *Peranan Indonesia dalam Konflik Arab-Israel setelah Kemenangan Hamas*, pada seminar Timur Tengah yang disampaikan pada Seminar Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri, Yogyakarta, 21 Februari 2006. Hal . 62

*percepatan kemerdekaan Palestina, membuka perwakilan untuk rakyat Palestina di Indonesia, dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel”*¹³

Dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama PD-PKS tersebut, oleh sekjen Demokrat yakni M. Anis Matta, maka pemerintah SBY diwajibkan untuk mengimplementasikan konsistensinya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Semenjak awal memang SBY telah memprioritaskan kebijakan luar negerinya terhadap Palestina, seperti melakukan kunjungan luar negeri perdana, ke Mesir untuk menghadiri pemakaman Presiden PLO Yasser Arafat, di Mesir, bulan November 2004, lalu diikuti oleh pernyataan resmi pemerintah RI pada tanggal 11 November 2004.¹⁴

Ikatan sosial-keagamaan yang terjadi antara Indonesia dengan Palestina tersebut memberikan pengaruh kepada arah kebijakan pemerintahan luar negeri RI yang dapat terlihat dari *Kontrak Politik* antara SBY dengan PKS. *Kontrak Politik* tersebut terbentuk melalui beberapa langkah yaitu Tim 5 Partai Keadilan Sejahtera bertemu dengan Tim 9 Partai Demokrat yang mana PKS mengajukan usulan kesepakatan dalam keaktifan peran luar negeri Indonesia di wilayah regional dan internasional. Khusus untuk isu perdamaian Timur Tengah, PKS ingin ada kesepakatan anggota koalisi guna mempercepat kemerdekaan Palestina. Lebih lanjut, Presiden PKS yang juga ketua Tim 5 PKS, Tifatul Sembiring, mengungkapkan bahwa *”Palestina adalah tempat lahirnya Imam Syafii, perjuangan untuk Palestina tentu harus pula mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia yang mana adalah*

¹³ Lampiran Piagam Kerjasama PD-PKS 2004-2009, [http://www.brazkie.multiply.com/journal/item/21/Inilah Kontrak Politik PKS-PD semoga bermanfaat buat ang lagi gelisah](http://www.brazkie.multiply.com/journal/item/21/Inilah_Kontrak_Politik_PKS-PD_semoga_bermanfaat_buat_ang_lagi_gelisah), diakses pada 2 Agustus 2010

¹⁴ *Ibid*

sesama masyarakat muslim dunia".¹⁵ Poin-poin *Kontrak Politik* PKS dengan SBY,

antara lain :

- a) Tidak membatasi gerak umat Islam.
- b) Tidak menutup pintu-pintu untuk alternatif solusi Islam

Dua poin diatas adalah bagian dari poin-poin kontrak politik PKS-SBY yang didalamnya menekankan perlunya RI untuk membela dan mempercepat proses terciptanya kemerdekaan di Palestina.

Setelah menjelaskan lingkup faktor internal seperti dijelaskan diatas, maka penjelasan lebih lanjut akan ditekankan faktor eksternal yang berpengaruh, yakni aksi Israel atas Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina sehingga memicu terjadinya reaksi di Indonesia.

Upaya isolasi politik internasional dan embargo ekonomi terhadap Palestina, pasca kemenangan Hamas semenjak tanggal 28 Februari 2006, telah mengakibatkan kemiskinan rata-rata meningkat dari 50% pada Maret, hingga 68% pada bulan November 2006. Menurut data NEC (Near East Consultant), kondisi perekonomian di Jalur Gaza terus memburuk sejak pemetaan dan penarikan sepihak Israel dari Jalur Gaza, semenjak September 2005. Demografi di Gaza menurut data NEC, mencakup 79% hidup di bawah garis kemiskinan, sementara di Tepi Barat 61% hidup di bawah garis kemiskinan, dan 28% diantaranya hidup dengan sangat miskin.¹⁶

¹⁵ Tifatul Sembiring, "Draft Kontrak Politik PKS;Dukung Penuh Palestina", *Harian Republika*, 29 April 2004, hal. 12

¹⁶ Akibat Embargo Internasional Atas Palestina, <http://www.eramuslim.com/berita/dunia/akibat-embargo-internasional-dan-blokade-israel-kemiskinan-di-gaza-79dan-tepi-barat-61.html>, diakses pada 1 Agustus 2010

Dampak dari aksi isolasi internasional yang dimotori Israel tersebut, masyarakat Islam di Indonesia mengeluarkan pernyataan keras, seperti yang diungkapkan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan bahwa "tindakan tersebut tidak sejalan dengan slogan-slogan demokrasi yang mereka (AS dan sekutunya Israel) gambar-gemborkan ke seluruh penjuru dunia".¹⁷ Sebagai bentuk dari pernyataan protes, PKS juga melaksanakan aksi demonstrasi besar-besaran diikuti oleh 130 ribu massa, mencakup kader, simpatisan, dari Jabodetabek, Banten, Purwakarta, Subang, dan Banten, sebagai wujud solidaritas Palestina.¹⁸ Dalam kesempatan tersebut Tifatul juga meminta pemerintah Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia menggalang solidaritas negara-negara Islam untuk membantu rakyat Palestina, yang tengah berjuang membebaskan diri dari penjajahan Israel.¹⁹

Keinginan Zionis Israel untuk segera mendekonstruksi Masjid Al-Aqsa kembali muncul ke permukaan pada awal tahun 2007, kali ini keinginan tersebut secara terang-terangan dipublikasikan ke dunia internasional. Pada tanggal 6 Februari 2007, proyek tersebut antara lain menggunakan metode penggalian terowongan-terowongan di bawah pondasi Al-Aqsa, seraya mengalirkan air dengan jumlah besar, tujuan tersebut jelas untuk mengikis kekuatan tanah penopang Al-Aqsa.²⁰ Kondisi rapuh tersebut membuat konstruksi Al-Aqsa siap runtuh apabila mengalami guncangan-guncangan dengan skala yang relatif tidak besar sekalipun.

⁷ PKS Tuntut AS dan Uni Eropa Cabut Embargo Terhadap Palestina, <http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=opsi&id=1493>, diakses pada 1 Agustus 2010

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Umat Islam Tidak Rela, <http://trenggalek.jelita.blogspot.com/2009/11/masjid-al-aqsha-dan-upaya-israel-untuk.html>, diakses pada 1 Agustus 2010

Rencana dekonstruksi ekstrim tersebut segera berdampak luas terhadap dunia Islam, termasuk Indonesia, yang menunjukkan solidaritas ke-Islamannya melalui pernyataan sikap menentang. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, pada 9 Februari 2007, menyampaikan permintaan kepada Israel agar segera menghentikan upaya penggalian arkeologi di kompleks Masjid Al-Aqsa, dengan alasan upaya tersebut telah menimbulkan kerusakan.²¹

Hal serupa telah diungkapkan oleh sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Najib, menyerukan kepada partai politik dan organisasi massa Islam di Indonesia agar meyakinkan pemerintah agar bersikap tegas dalam menegakkan perdamaian dan keadilan di muka bumi khususnya di Timur Tengah.²² Najib juga mengungkapkan perlunya bagi segenap partai politik dan organisasi massa Islam menyadari keharusan untuk mendukung kepercayaan diri pemerintah dalam merespon isu tersebut.²³

Begitu pula dengan aksi Israel ke Gaza pada tahun 2008, dalam operasi militer besar-besaran yang dimulai dari tanggal 27 Desember hingga 13 Januari 2009 ke Jalur Gaza, operasi "*Cast Lead*" oleh Israel disinyalir sebagai bagian dari upayanya untuk mengikis habis Hamas. Permasalahannya adalah karena Israel secara nyata telah menggunakan bom-bom yang mengandung WP alias White Phosphorus (fosfor putih). Bom tersebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena kemampuannya membakar tubuh manusia, menimbulkan luka bakar kimia sejak kulit, daging, hingga tulang korban. Penggunaan WP ini jelas-jelas melanggar hukum humaniter

²¹ *Ibid*

²² SBY!Selamatkan Al-Aqsa <http://www.teguhtimur.com/2007/02/11/sby-selamatkan-al-aqsa>, diakses pada 1 Agustus 2010

²³ *Ibid*

internasional. Melihat fakta ini, utusan PBB, Richard Falk , secara meyakinkan menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap Gaza adalah praktik Genosida.²⁴ Terhitung ribuan orang Palestina telah terbunuh dalam operasi *Cast Lead*, meskipun hal tersebut mengundang protes di seluruh dunia, tetapi mengapa tidak mendapat perhatian dari PBB.”²⁵

E. Hipotesis

Konsistensi Indonesia untuk terus mendukung upaya kemerdekaan Palestina terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor Internal, yakni Indonesia sebagai negara dengan mayoritas 88% populasi penduduk memeluk agama Islam, menjadikannya sebagai masyarakat Muslim terbesar di dunia, memiliki ikatan sosial-keagamaan dengan Palesatina. Pengaruh tersebut dapat terlihat dari keinginan partai-partai politik terhadap pemerintahan SBY untuk tetap konsisten mendukung perjuangan Palestina.
2. Faktor Eksternal, yakni aksi dan kekejaman Israel atas Palestina dan reaksi masyarakat Islam sedunia yang mendorong berbagai macam aksi solidaritas ke-Islaman sedunia.

²⁴ HAM yang Tercabik di Bumi Palestina,
<http://www.csrc.or.id/artikel/index.php?detail=20090120010932>, diakses pada 17 Agustus 2010

²⁵ Invasi Gaza: *Operasi Cast Lead, bagian Dari Sebuah Agenda Intelijen Militer Israel Yang Lebih Luas*,
<http://www.swaramuslim.com/berita/more.php?id=57370120>, diakses pada 11 November 2009

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah, untuk menjawab rumusan masalah, mengenai mengapa Indonesia pada masa pemerintahan SBY (2004-2009) turut berperan serta secara aktif membantu Palestina dalam konflik dengan Israel.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan tipe analisa deskriptif,²⁶ untuk menuliskan kembali apa yang telah terjadi seputar hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Palestina.

Penelitian ini mengedepankan teknik pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan. Penulis menggunakan data bersumber dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah, dan media internet.

H. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kurun waktu masalah yang diteliti berkisar antara tahun 2004-2009, digunakannya batasan tahun 2004 sebagai masa dimulainya pemerintahan SBY pada tanggal 20 Oktober 2004. Sedangkan batasan tahun 2009 digunakan karena alasan berakhirnya masa pemerintahan SBY dalam periode 5 tahun masa jabatannya.

²⁶ Marsedes Marbun, *Pengantar Ilmu Politik*, (Sinar Baru) hal 3

I. Garis Besar Isi Penulisan dan Sistematika

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan memberikan gambaran isi skripsi secara keseluruhan. Dasar analisa masalah dalam skripsi ini terdiri atas : topik penelitian, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, teori, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, dan garis besar isi penulisan dan sistematika.

BAB II : Bentuk-bentuk Dukungan Indonesia Pada Upaya Kemerdekaan Palestina

Bab ini akan membahas realisasi dukungan Indonesia sebagai implementasi dari konsistensi pernyataan sikap pemerintah dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, serta peran serta RI dalam membantu konflik Palestina sebelum masa pemerintahan SBY.

BAB III : Faktor Internal Sebagai Dasar Konsistensi Indonesia Mendukung Kemerdekaan Palestina

Bab ini akan membahas faktor internal, yaitu Indonesia sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia. Persamaan sosial keagamaan dengan Palestina dalam kenyataannya telah menggerakkan semangat solidaritas di antara keduanya

BAB IV : Faktor eksternal Sebagai Dasar Konsistensi Indonesia Mendukung Kemerdekaan Palestina

Bab ini akan membahas faktor eksternal, aksi militer Israel atas Palestina telah menimbulkan permasalahan bagi rakyat Palestina. Sementara tindakan penyerangan

atas kompleks Masjid Al-Aqsa mengakibatkan kemarahan bagi dunia Islam internasional.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.